

**KURIKULUM PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA STRATA-1  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2017**

**A. Visi Pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

“Menjadi program sarjana strata-1, program studi ilmu hukum yang terkemuka, unggul dan kompetitif pada tahun 2025”

Penjelasan

Terkemuka adalah suatu cita-cita untuk mencapai keadaan yang menunjukkan tingkat penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum yang ditujukan guna mengembangkan ilmu pengetahuan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mampu berkompetisi pada era globalisasi, baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, maupun hukum Internasional pada tahun 2025.

Unggul dimaksudkan bahwa Program Studi Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya harus mampu membawa setiap mahasiswa mencapai kemampuan dan prestasi secara terukur. Dalam hal ini kata unggul juga tersirat harapan-harapan terhadap apa yang dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikannya (*learning outcomes*), yaitu memiliki kemampuan intelektual berlandaskan moral dan etika serta keterampilan, cakap dalam menganalisis situasi dan kondisi kehidupan hukum, guna menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan sistem hukum yang berguna bagi masyarakat.

Kompetitif adalah kemampuan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang diperoleh dari karakteristik dan sumber daya yang dimilikinya yang memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan program sarjana strata-1, program studi ilmu hukum pada fakultas hukum lainnya.

**B. Misi Pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

1. Menyelenggarakan pendidikan program sarjana strata-1, program studi ilmu hukum yang unggul, berkualitas, kreatif, inovatif, dan kompetitif secara akademis;
2. Menyelenggarakan riset ilmu hukum yang mendukung pendidikan program sarjana strata-1, program studi ilmu hukum yang unggul, berkualitas dan relevan dengan kondisi perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara;
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pendidikan program sarjana strata-1, program studi ilmu hukum guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat; dan
4. Menjalin kerjasama dengan institusi lokal, nasional, regional maupun internasional dalam bidang pendidikan program sarjana strata-1, program studi ilmu hukum.

**C. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## Misi 1

Menyelenggarakan pendidikan program sarjana strata-1, program studi ilmu hukum yang unggul, berkualitas, kreatif, inovatif, dan kompetitif secara akademis.

## Tujuan

Menjadi institusi pendidikan program sarjana strata-1, program studi ilmu hukum yang terkemuka, berkualitas, kreatif, inovatif dan kompetitif berlandaskan etika dan akhlak mulia.

## Sasaran

1. Terwujudnya pendidikan program sarjana strata-1, program studi ilmu hukum yang profesional, transparan, efisien dan efektif dalam upaya mewujudkan lulusan sarjana hukum yang memiliki kompetensi secara akademis, profesional, beretika dan berakhlak mulia yang mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan internasional;
2. Terwujudnya sistem pembelajaran yang berkualitas, kreatif, inovatif, dan kompetitif yang sinergis dengan kebutuhan ilmu pengetahuan dan jasa profesional dalam bidang hukum;
3. Terwujudnya kualitas keilmuan sarjana hukum yang bersandarkan pada etika dan akhlak mulia; dan
4. Terwujudnya reputasi pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terkemuka dalam bidang pendidikan hukum pada level lokal, nasional, regional dan internasional.

## Strategi

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program pengembangan, peningkatan dan penjaminan mutu kurikulum dan silabus pendidikan program sarjana strata-1, program studi ilmu hukum yang berkualitas, kreatif, inovatif dan kompetitif yang bersandarkan pada etika dan akhlak mulia secara berkelanjutan guna memenuhi dan/atau melampaui standar nasional dan internasional dengan masa studi mahasiswa maksimal 4 tahun dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.0;
2. Program peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran program sarjana strata-1, program studi ilmu hukum yang sesuai dengan kebutuhan ilmu pengetahuan dan jasa profesional dalam bidang hukum berupa kualifikasi penguasaan keilmuan dan keterampilan teknis hukum sehingga mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan internasional;
3. Program peningkatan mutu bidang sumberdaya manusia, sarana/prasarana dan manajemen dengan kebijakan perencanaan yang seksama, menyeluruh dan terpadu dengan mempertimbangkan perimbangan antara kegiatan dan ketersediaan sumberdaya yang ada, antara lain melalui persiapan tenaga pengajar untuk melanjutkan studi tingkat doktoral dalam bidang yang sesuai dengan arah peminatan yang sudah ditetapkan, melakukan evaluasi dan penyesuaian kurikulum secara periodik untuk menjaga kualitas pendidikan, menyelenggarakan berbagai bentuk pertemuan ilmiah (seperti seminar, simposium, lokakarya, konferensi), perkuliahan tamu, mengirim tenaga pengajar untuk mengikuti berbagai kegiatan ilmiah (termasuk kursus dan pelatihan) di dalam maupun di luar negeri secara berkala dan terprogram;
4. Program melengkapi dan mengintegrasikan sistem informasi manajemen dan keuangan secara transparan dan akuntabel di Fakultas maupun Universitas;
5. Program pemberdayaan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan minat dan kebutuhan mahasiswa melalui penguatan organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Program peningkatan persentase (kuantitas) dan mutu (kualitas) mahasiswa Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya melalui kebijakan rekrutmen mahasiswa bermutu, terutama di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang;
7. Program peningkatan sosialisasi dan pertukaran pengalaman dalam proses mendapatkan pengakuan dan akreditasi nasional dan internasional dengan kebijakan yang didasarkan pada hasil evaluasi kesiapan akreditasi nasional (2017–2022) dan internasional (2023–2025).

### Misi 2

Menyelenggarakan riset ilmu hukum yang mendukung pendidikan program sarjana strata-1, program studi ilmu hukum yang unggul, berkualitas dan relevan dengan kondisi perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara.

### Tujuan

Menjadi institusi pendidikan program sarjana strata-1, program studi ilmu hukum dengan penguatan riset berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi hukum yang berkualitas dan relevan dengan kondisi perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara.

### Sasaran

1. Terwujudnya sumberdaya peneliti yang berkualitas;
2. Terwujudnya kualitas dan kuantitas hasil riset yang relevan dengan kondisi perkembangan ilmu hukum guna menjawab tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta memiliki daya saing secara lokal, nasional, regional dan internasional;
3. Terwujudnya budaya riset pada sivitas akademika Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya melalui penguatan riset berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi hukum yang berkualitas dan relevan dengan kondisi perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara; dan
4. Terwujudnya peningkatan reputasi pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terkemuka melalui peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dan penguatan jurnal yang ada agar dapat terakreditasi secara nasional maupun internasional.

### Strategi

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan mutu riset melalui *up-grading* pemahaman konsep riset terkait dengan pendidikan program sarjana strata-1, program studi ilmu hukum;
2. Program peningkatan riset mahasiswa secara kuantitas dan kualitas;
3. Program berlangganan jurnal yang bereputasi, baik nasional maupun internasional, dalam rangka menambah wawasan pengetahuan teraktual, membuat dan mempublikasikan jaringan-jaringan informasi yang berkaitan dengan pemberian dana bantuan penelitian, melakukan diseminasi informasi dan pengembangan keilmuan yang telah dilakukan di lingkungan universitas dalam bentuk pelatihan-pelatihan keahlian dan konsultasi;
4. Program peningkatan mutu riset bertaraf internasional dengan kebijakan yang difokuskan pada penyelesaian permasalahan terkait bidang hukum dan mendorong riset-riset kerjasama dalam proses riset, pendanaan maupun publikasi serta peningkatan mutu sumberdaya manusia dan sarana/prasarana riset yang dikoordinasi pihak Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Program fasilitasi pengembangan kolaborasi riset, baik secara nasional maupun internasional, melalui kebijakan pengembangan riset yang integral, termasuk aspek kapasitas institusi, sumberdaya, manajemen, data, pengawasan dan pembiayaan;

6. Program pemberian dukungan fasilitas riset untuk skripsi dan pengabdian kepada masyarakat dengan kebijakan pemberian dukungan finansial dan non-finansial yang diusahakan dari berbagai pihak dan sumber;
7. Program penelaahan dan penyusunan peta jalan (*road-map*) pengajuan akreditasi nasional dan internasional serta peningkatan akreditasi nasional (2017–2022) dan internasional (2023–2025) pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, termasuk jurnal-jurnal yang telah dimiliki oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
8. Program peningkatan sosialisasi dan pertukaran pengalaman dalam upaya mendapatkan pengakuan dan akreditasi nasional dan internasional atas pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

### Misi 3

Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pendidikan program sarjana strata-1, program studi ilmu hukum guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat

### Tujuan

Menjadi institusi pendidikan program sarjana strata-1, program studi ilmu hukum yang menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat.

### Sasaran

1. Terwujudnya peningkatan kapasitas pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
2. Terwujudnya kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan peran dan kontribusi pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk memberikan solusi atas persoalan lokal, nasional dan global; dan
3. Terwujudnya reputasi pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terkemuka dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

### Strategi

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal, nasional dan internasional dengan kebijakan meningkatkan kepedulian dan empati dalam membantu dan memberdayakan masyarakat sehingga pengalaman dan keahlian, khususnya penerapan ilmu hukum yang diperoleh dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat;
2. Program pengembangan kapasitas penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi hukum dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
3. Program menjaga dan meningkatkan peran dan kontribusi pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam penerapan ilmu hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat, bangsa dan negara berkoordinasi dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Program penelaahan dan penyusunan peta jalan (*road-map*) pengabdian kepada masyarakat pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan kebijakan koordinasi dan penyesuaian,

baik dengan Unit Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas maupun Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat universitas.

#### Misi 4

Menjalin kerjasama dengan institusi lokal, nasional, regional dan internasional dalam bidang pendidikan program sarjana strata-1, program studi ilmu hukum.

#### Tujuan

Menjadi institusi pendidikan program sarjana strata-1, program studi ilmu hukum yang memiliki kerjasama sinergis dan strategis dengan alumni dan institusi lokal, nasional, regional dan internasional.

#### Sasaran

1. Terwujudnya peningkatan jalinan kerjasama pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang strategis dan sinergis dengan berbagai insitusi lokal, nasional, regional dan internasional secara berkesinambungan;
2. Terwujudnya pelayanan dan pendampingan alumni Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang optimal; dan
3. Terwujudnya peran dan kontribusi alumni Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya guna pencapaian tridharma perguruan tinggi.

#### Strategi

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program penguatan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya melalui penyusunan tata kelola kerjasama dan kegiatan bersama;
2. Program pengembangan jaringan kolaborasi dengan alumni Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk Pusat Kajian, Unit, Bagian dan Program Studi internal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Program pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi dan institusi lokal, nasional, regional dan internasional dalam bidang ilmu hukum secara berkesinambungan; dan
4. Program penelaahan dan penyusunan peta jalan (*road-map*) kerjasama Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya guna mendukung pengajuan akreditasi nasional dan internasional serta peningkatan akreditasi nasional (2017–2022) dan internasional (2023–2025).

### **D. Profil Lulusan Pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

#### 1. Penegak Hukum

Yaitu mereka yang karena jabatannya melaksanakan proses atau upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar terjaminnya kepastian hukum.

Sebagai contoh: Polisi, Jaksa, Hakim, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

#### 2. Jasa Bantuan dan Pelayanan Hukum

Yaitu mereka yang memberikan jasa bantuan dan pelayanan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh: Advokat, Kurator, dan Konsultan Hukum.

### 3. Aparatur Sipil Negara

Yaitu mereka yang berkarya sebagai pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada lembaga negara dan/atau instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Sebagai contoh: Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

### 4. Profesi lainnya

Yaitu mereka yang memiliki profesi yang berkaitan dengan bidang hukum selain dari angka 1, 2 dan 3 di atas.

Sebagai contoh: *Legislator, Legal/Contract Drafter* dan *Inhouse Lawyer*.

## **E. Capaian Pembelajaran Lulusan Pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

### 1. Sikap

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

### 2. Pengetahuan

- a. Memiliki pengetahuan, yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menjelaskan dan mendiskusikan, tentang Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Nasional Indonesia secara komprehensif, utuh, dan sistemik;
- b. Memahami teknik dasar kemahiran hukum yang diperlihatkan melalui kemampuan dalam bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di depan pengadilan, beradvokasi, dan dalam merancang serta menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum;
- c. Mengaplikasikan kemampuan dan kemahiran berpikir yuridis yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan simulasi kasus-kasus hukum;
- d. Mampu menganalisis permasalahan hukum yang dihasilkan melalui metode

penelitian dan penulisan hukum sesuai dengan prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif, atau menemukan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional;

- e. Mensintesis pengetahuan yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menjelaskan dan mendiskusikan, tentang hukum yang mempengaruhi perkembangan Sistem Hukum Nasional Indonesia, serta aspek lain yang berkaitan erat dengan studi dan perkembangan hukum;
- f. Mampu mengevaluasi Sistem Hukum Nasional Indonesia dan aspek lain dalam studi hukum sesuai dengan studi dan perkembangan hukum untuk disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat.

### 3. Keterampilan Umum

- a. Kemampuan dalam menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika karya ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, dan mengamankan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

### 4. Keterampilan Khusus

- a. Mampu menjelaskan dan mendiskusikan, tentang Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Nasional Indonesia secara komprehensif, utuh, dan sistemik;
- b. Mahir dalam bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di depan pengadilan, beradvokasi, dan dalam merancang serta menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum;
- c. Mahir dalam berpikir yuridis yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan simulasi kasus-kasus hukum;
- d. Mahir dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai dengan prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif, atau menemukan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional;

- e. Mampu menjelaskan dan mendiskusikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Sistem Hukum Nasional Indonesia, serta aspek lain yang berkaitan erat dengan studi dan perkembangan hukum;
- f. Mampu melakukan evaluasi Sistem Hukum Nasional Indonesia dan aspek lain dalam studi hukum sesuai dengan studi dan perkembangan hukum untuk disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat.

## F. Peta Capaian Pembelajaran Lulusan Pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

➤ Lihat Deskripsi Mata Kuliah

## G. Struktur Kurikulum Pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

### G.1. Penjenjangan Mata Kuliah

#### Jenjang 1: Mata Kuliah Pengantar

##### 1.1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) [Universitas]

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Pengampu	Prasyarat
01	UNI001117	MPK 1 (Pendidikan Agama)	2	UNI (MPK)	—
02	UNI002117	MPK 2 (Pendidikan Kewarganegaraan)	2		—
03	UNI003117	MPK 3 (Bahasa Indonesia)	2		—
04	UNI004117	MPK 4 (Pendidikan Pancasila)	2		—
05	BHS001117	Bahasa Inggris	2	UNI (LBhs)	—

##### 1.2. Mata Kuliah Pengantar [Ilmu Hukum]

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Pengampu	Prasyarat
01	HUK001117	Pengantar Ilmu Hukum	4	NB	—
02	HUK002117	Ilmu Negara	3	HTN	—

##### 1.3. Mata Kuliah Pengantar, Lanjutan [Ilmu Hukum]

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Pengampu	Prasyarat
01	HUK003117	Pengantar Hukum Indonesia	4	NB	—
02	HUK004117	Terminologi Hukum Asing ( <i>Foreign Legal Terms</i> )	2		—

##### 1.4. Mata Kuliah Pengantar [Non Ilmu Hukum]

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Pengampu	Prasyarat
01	PIE001117	Pengantar Ilmu Ekonomi	2	NFH (FEK)	—
02	SOS001117	Pengantar Sosiologi	2	NFH (FIS)	—
03	PIP001117	Pengantar Ilmu Politik	2		—

##### 1.5. Mata Kuliah Pengantar, Lanjutan [Non Ilmu Hukum]

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Pengampu	Prasyarat
01	ANT001117	Antropologi Budaya	2	NFH (FIS)	—

#### Jenjang 2: Mata Kuliah Hukum Dasar

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Pengampu	Prasyarat
01	HUK005217	Hukum Pidana	4	PID	PHI
02	HUK006217	Hukum Perdata	4	PDT	
03	HUK007217	Hukum Islam	2	PDT [Islam]	PIH
04	HUK008217	Hukum Adat	2	PDT [Adat]	
05	HUK009217	Hukum Tata Negara	4	HTN	PIH, IN
06	HUK010217	Hukum Administrasi Negara	4	HAN	



07	HUK011217	Hukum Internasional	4	HIN	PHI
08	HUK012217	Hukum Tata Negara Indonesia	4	HTN	HTN

### Jenjang 3: Mata Kuliah Hukum Lanjutan

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Pengampu	Prasyarat
01	HUK013217	Hukum Acara Pidana	2	PID	HPD
02	HUK014217	Hukum Pidana dalam Kodifikasi	2		
03	HUK015217	Kriminologi	2		
04	HUK016217	Hukum Acara Perdata	2	PDT	HPT
05	HUK017217	Hukum Dagang	3		
06	HUK018217	Hukum Perikatan	2		
07	HUK019217	Hukum Perkawinan	2		
08	HUK020217	Hukum Kesehatan	2		
09	HUK021217	Ilmu Perundang-undangan	2	MB (HTN & HAN)	PHI, IN
10	HUK022217	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	HTN	HTN
11	HUK023217	Hukum Acara Tata Usaha Negara			
12	HUK024217	Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa	2	HAN	HAN
13	HUK025217	Hukum Perizinan	2		
14	HUK026217	Hukum Pajak	2		
15	HUK027217	Hukum Agraria	2	MB (HAN & PDT)	PHI
16	HUK028217	Hukum Kemaritiman	2	HIN	PHI, IN
17	HUK029217	Hukum Perdata Internasional	2	MB (HIN & PDT)	HPT
18	HUK030217	Hukum Lingkungan	2	LB	HAN
19	HUK031217	Hukum Hak Asasi Manusia	2		HPD, HTN

### Jenjang 4: Mata Kuliah Pengembangan

#### 4.1. Pengembangan Keilmuan

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Pengampu	Prasyarat
01	HUK032317	Sosiologi Hukum	2	NB	MKD
02	HUK033317	Etika dan Tanggung Jawab Profesi	2		
03	HUK034317	Metode Penelitian Hukum	2		
04	HUK035317	Filsafat Hukum	2		

#### 4.2. Pengembangan Keterampilan

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Pengampu	Prasyarat
01	HUK036317	Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)	14	FH (Lab)	HA + IPU

Tujuh kelas dalam pendidikan pelatihan PLKH terdiri dari:

No	Nama Pendidikan Pelatihan
<b>Litigasi</b>	
01	Praktik Peradilan Pidana
02	Praktik Peradilan Perdata
03	Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi
04	Praktik Peradilan Tata Usaha Negara
<b>Non-Litigasi</b>	
05	Perancangan Perundang-undangan
06	Perancangan Kontrak dan Audit Hukum ( <i>Legal Audit</i> )
07	<i>Alternative Dispute Resolution (ADR)</i>

#### 4.3. Mata Kuliah Program Kekhususan (PK)

No	Nama Mata Kuliah	SKS	Pengampu	Prasyarat
1-5	5 Mata Kuliah Wajib PK	10	Bagian / PK	MKL & persetujuan Ketua Bagian
1-3	3 Mata Kuliah Pilihan PK	6		

##### 4.3.1. PK Hukum Pidana

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
----	------------------	------------------	-----

<b>WAJIB</b>			
01	HPD101317	Sistem Peradilan Pidana	2
02	HPD102317	Hukum Penintensier	2
03	HPD103317	Tindak Pidana di Bidang Perekonomian	2
04	HPD104317	Hukum Pidana di Luar KUHP	2
05	HPD105317	Hukum Pidana Anak	2
<b>PILIHAN</b>			
01	HPD106317	Perbandingan Hukum Pidana	2
02	HPD107317	Kapita Selektta Hukum Pidana	2
03	HPD108317	Hukum Pidana Internasional	2
04	HPD109317	Hukum Pidana Administrasi	2
05	HPD110317	Viktimologi	2
06	HPD111317	Hukum Pidana Islam	2
07	HPD112317	Kapita Selektta Kriminologi	2

#### 4.3.2. PK Hukum Perdata

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
<b>WAJIB</b>			
01	HPT201317	Hukum Persetujuan Khusus	2
02	HPT202317	Hukum Perusahaan	2
03	HPT203317	Hukum Penanaman Modal	2
04	HPT204317	Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	2
05	HPT205317	Hukum Perbankan	2
<b>PILIHAN</b>			
01	HPT206317	Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat	2
02	HPT207317	Hukum Surat Berharga	2
03	HPT208317	Hukum Keluarga dalam Islam	2
04	HPT209317	Hukum Jaminan	2
05	HPT210317	Hukum Acara Peradilan Agama	2
06	HPT211317	Kapita Selektta Hukum Perdata	2
07	HPT212317	Perbuatan Melanggar Hukum	2
08	HPT213317	Hukum Lembaga Pembiayaan	2
09	HPT214317	Hukum Asuransi	2
10	HPT215317	Hukum Perlindungan Konsumen	2
11	HPT216317	Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	2
12	HPT217317	Hukum Bisnis Internasional	2
13	HPT218317	Hukum Pasar Modal	2
14	HPT219317	Hukum Persaingan Usaha	2
15	HPT220317	Hukum Koperasi	2
16	HPT221317	Hukum Transportasi	2
17	HPT222317	Hukum Ekonomi Islam	2

#### 4.3.3. PK Hukum Tata Negara

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
<b>WAJIB</b>			
01	HTN301317	Hukum Presiden	2
02	HTN302317	Hukum Parlemen	2
03	HTN303317	Hukum Peradilan	2
04	HTN304317	Perbandingan Hukum Tata Negara	2
05	HAN418317	Hukum Perencanaan Anggaran Negara	2
<b>PILIHAN</b>			
01	HTN305317	Sistem Hukum Nasional	2
02	HTN306317	Hukum Pemilihan Umum	2
03	HTN307317	Hukum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2
04	SPI301317	Sistem Politik Indonesia	2
05	HAN401317	Hukum Kewarganegaraan	2
06	EKO301317	Ekonomi Pembangunan	2

- Mata kuliah Hukum Perencanaan Anggaran Negara diampu bersama Bagian Hukum Tata Negara dan Bagian Hukum Administrasi Negara
- Mata kuliah Hukum Kewarganegaraan diampu oleh Bagian Hukum Administrasi Negara
- Mata kuliah Sistem Politik Indonesia diampu oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Mata kuliah Ekonomi Pembangunan diampu oleh Fakultas Ekonomi

#### 4.3.4. PK Hukum Administrasi Negara

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
<b>WAJIB</b>			
01	HAN401317	Hukum Kewarganegaraan	2
02	HAN402317	Hukum Keuangan Negara	2
03	HAN403317	Hukum Kependudukan	2
04	HAN404317	Hukum Pelayanan Publik	2
05	HAN405317	Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	2
<b>PILIHAN</b>			
01	HAN406317	Hukum Ketetapan Administrasi Negara	2
02	HAN407317	Diskresi Pemerintahan	2
03	HAN408317	Hukum Pengelolaan Aset Negara	2
04	HAN409317	Hukum Keterbukaan Informasi Publik	2
05	HAN410317	Hukum Ketenagakerjaan dan Perburuhan	2
06	HAN411317	Hukum Kepegawaian	2
07	HAN412317	Hukum Tanah	2
08	HAN413317	Hukum Tata Ruang	2
09	HAN414317	Hukum Pertambangan	2
10	HAN415317	Hukum Perkebunan	2
11	HAN416317	Hukum Kehutanan	2
12	HAN417317	Hukum Pengelolaan Sumberdaya Air	2
13	HAN418317	Hukum Perencanaan Anggaran Negara	2

- Mata kuliah Hukum Perencanaan Anggaran Negara diampu bersama Bagian Hukum Tata Negara dan Bagian Hukum Administrasi Negara

#### 4.3.5. PK Hukum Internasional

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
<b>WAJIB</b>			
01	HIN501317	Hukum Diplomatik dan Konsuler	2
02	HIN502317	Hukum Laut Internasional	2
03	HIN503317	Hukum Perjanjian Internasional	2
04	HIN504317	Hukum Organisasi Internasional	2
05	HIN505317	Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional	2
<b>PILIHAN</b>			
01	HIN506317	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	2
02	HIN507317	Hukum Kontrak Internasional	2
03	HIN508317	Hukum Humaniter	2
04	HIN509317	Hukum Udara dan Ruang Angkasa	2
05	HIN510317	Hukum Transaksi Internasional	2
06	HIN511317	Hukum Pengungsi Internasional	2
07	HIN512317	Hukum Pencemaran Lintas Batas	2

### Jenjang 5: Tugas Akhir

#### 5.1. Kegiatan Akademik Universitas [Opsional]

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Pengampu	Prasyarat
01	UNI001317	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4	UNI (LPPM)	MKL

- KKN adalah kegiatan akademik pilihan (tidak wajib ditempuh oleh mahasiswa)

#### 5.2. Kegiatan Akademik Fakultas [Wajib]

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Pengampu	Prasyarat
----	------------------	------------------	-----	----------	-----------

01	HUK037317	Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	4	FH (Lab)	MKL
	atau				
	HUK038317	Klinik Hukum			
02	HUK039317	Karya Tulis Ilmiah	4	Bagian / PK	MKL, PLKH ≥ C & persetujuan Ketua Bagian

➤ Mahasiswa wajib menempuh salah satu di antara kegiatan akademik KKL atau Klinik Hukum

## G.2. Distribusi Mata Kuliah Pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

### Semester 1 [Paket untuk mahasiswa baru]

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
01	UNI001117	MPK 1 (Pendidikan Agama)	2	—
02	UNI002117	MPK 2 (Pendidikan Kewarganegaraan)	2	—
03	HUK001117	Pengantar Ilmu Hukum	4	—
04	HUK002117	Ilmu Negara	3	—
05	PIE001117	Pengantar Ilmu Ekonomi	2	—
06	BHS001117	Bahasa Inggris	2	—
07	SOS001117	Pengantar Sosiologi	2	—
08	PIP001117	Pengantar Ilmu Politik	2	—
Jumlah sks Semester 1 =			19	

### Semester 2

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
01	UNI003117	MPK 3 (Bahasa Indonesia)	2	—
02	UNI004117	MPK 4 (Pendidikan Pancasila)	2	—
03	HUK003117	Pengantar Hukum Indonesia	4	PIH
04	HUK004117	Terminologi Hukum Asing ( <i>Foreign Legal Terms</i> )	2	—
05	HUK007217	Hukum Islam	2	PIH
06	HUK008217	Hukum Adat	2	
07	HUK009217	Hukum Tata Negara	4	PIH, IN
08	ANT001117	Antropologi Budaya	2	—
Jumlah sks Semester 2 =			20	

### Semester Antara [Tahun Pertama]

➤ Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah maksimal 9 sks—baik untuk percepatan (menempuh mata kuliah baru) maupun mengulang mata kuliah yang pernah ditempuh (untuk perbaikan/*remedial*)

### Semester 3

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
01	HUK005217	Hukum Pidana	4	PHI
02	HUK006217	Hukum Perdata	4	
03	HUK012217	Hukum Tata Negara Indonesia	4	HTN
04	HUK010217	Hukum Administrasi Negara	4	PHI
05	HUK011217	Hukum Internasional	4	
06	HUK027217	Hukum Agraria	2	
07	HUK028217	Hukum Kemaritiman	2	PHI, IN
Jumlah sks Semester 3 =			24	

### Semester 4

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
01	HUK013217	Hukum Acara Pidana	2	HPD
02	HUK014217	Hukum Pidana dalam Kodifikasi	2	
03	HUK015217	Kriminologi	2	
04	HUK016217	Hukum Acara Perdata	2	HPT
05	HUK017217	Hukum Dagang	3	

06	HUK018217	Hukum Perikatan	2	
07	HUK019217	Hukum Perkawinan	2	
08	HUK022217	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	HTN
09	HUK021217	Ilmu Perundang-undangan	2	PHI, IN
10	HUK023217	Hukum Acara Tata Usaha Negara	2	HAN
11	HUK024217	Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa	2	
Jumlah sks Semester 4 =			23	

### Semester Antara [Tahun Kedua]

- Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah maksimal 9 sks—baik untuk percepatan (menempuh mata kuliah baru) maupun mengulang mata kuliah yang pernah ditempuh (untuk perbaikan/*remedial*)

### Semester 5

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
01	HUK025217	Hukum Perizinan	2	HAN
02	HUK026217	Hukum Pajak	2	
03	HUK030217	Hukum Lingkungan	2	
04	HUK031217	Hukum Hak Asasi Manusia	2	HPD, HTN
05	HUK020217	Hukum Kesehatan	2	PHI
06	HUK029217	Hukum Perdata Internasional	2	HPT
07	HUK032317	Sosiologi Hukum	2	MKD
08	HUK033317	Etika dan Tanggung Jawab Profesi	2	
09	HUK034317	Metode Penelitian Hukum	2	
10	HUK035317	Filsafat Hukum	2	
Jumlah sks Semester 5 =			20	

### Semester 6

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
01	HUK036317	Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)	14	HA + IPU
02	5 Mata Kuliah Wajib PK		10	MKL & persetujuan Ketua Bagian
Jumlah sks Semester 6 =			24	

- Lihat mata kuliah wajib PK (terlampir)

#### PLKH terdiri dari 7 (kelas) kelas pendidikan latihan, yaitu:

No	Nama Komponen Pendidikan Pelatihan
<b>Litigasi:</b>	
1	Praktik Peradilan Pidana
2	Praktik Peradilan Perdata
3	Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi
4	Praktik Peradilan Tata Usaha Negara
<b>Non-Litigasi:</b>	
5	Perancangan Perundang-undangan
6	Perancangan Kontrak dan Audit Hukum ( <i>Legal Audit</i> )
7	<i>Alternative Dispute Resolution (ADR)</i>

### Semester Antara [Tahun Ketiga]

- Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah maksimal 9 sks—baik untuk percepatan (menempuh mata kuliah baru) maupun mengulang mata kuliah yang pernah ditempuh (untuk perbaikan/*remedial*)

### Semester 7 [Tugas Akhir]

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
01	3 Mata Kuliah Pilihan PK		6	MKL & persetujuan Ketua Bagian
02	UNI001317	Kuliah Kerja Nyata (KKN) [Opsional]	4	MKL
03	HUK037317	Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	4	MKL
	atau			
	HUK038317	Klinik Hukum		

04	HUK039317	Karya Tulis Ilmiah	4	MKL, PLKH $\geq$ C & persetujuan Ketua Bagian
Jumlah sks Semester 7 =			14	(+KKN=18 sks)

- Lihat mata kuliah pilihan PK (terlampir)
- Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya (LPPM UNSRI) yang bersifat pilihan (mahasiswa tidak wajib menempuhnya).
- Kuliah Kerja Lapangan atau Klinik Hukum adalah kegiatan akademik yang wajib ditempuh salah satunya oleh mahasiswa. Karena KKL / Klinik Hukum dilaksanakan di luar kampus (*off campus*), penjadwalan kegiatannya akan ditempatkan pada Semester Antara. Mahasiswa yang menempuh KKL / Klinik Hukum tidak diperbolehkan menempuh mata kuliah lainnya (termasuk untuk mengulang) yang pelaksanaannya di lingkungan kampus (*on campus*) karena mahasiswa yang bersangkutan tidak akan dapat memenuhi persyaratan partisipasi kegiatan akademik minimal 85%;
- Jumlah Satuan Kredit Semester pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya adalah 144 sks (sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi);
  - Bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN, jumlah perolehan sks mahasiswa yang bersangkutan adalah 148.

### **Semester 8, 9 dan 10**

- Untuk mahasiswa yang belum menuntaskan proses pembelajarannya pada Semester 7, tersedia 3 (tiga) semester cadangan bagi yang bersangkutan untuk menuntaskan pendidikannya pada Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu pada Semester 8, 9 dan 10;
- Batas maksimal untuk menuntaskan pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya adalah 10 (sepuluh) semester.

### **Semester Antara [Tahun Keempat dan Kelima (Terakhir)]**

- Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah maksimal 9 sks—baik untuk percepatan (menempuh mata kuliah baru) maupun mengulang mata kuliah yang pernah ditempuh (untuk perbaikan/*remedial*)
- Mahasiswa yang pada akhir Semester Antara tahun kelima tidak/belum menuntaskan pendidikan Program Sarjana S1 dikeluarkan (*Drop Out*) dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

### **Daftar Singkatan Mata Kuliah Prasyarat**

HA	: Hukum Acara (terdiri dari: Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dan Hukum Acara Tata Usaha Negara)
HAN	: Hukum Administrasi Negara
HPD	: Hukum Pidana
HPT	: Hukum Perdata
HTN	: Hukum Tata Negara
HTN-INA	: Hukum Tata Negara Indonesia
IN	: Ilmu Negara
IPU	: Ilmu Perundang-undangan
MKD	: Mata Kuliah [Hukum] Dasar (Terdiri dari: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Tata Negara, dan Hukum Administrasi Negara)
MKL	: Mata Kuliah [Hukum] Lanjutan (Terdiri dari: Hukum Agraria, Hukum Kesehatan, Hukum Kemaritiman, Hukum Internasional, Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa, Hukum Perizinan, Hukum Lingkungan, Hukum Tata Negara Indonesia, Hukum Perikatan, Hukum Perdata Internasional, Hukum Pidana dalam Kodifikasi, Hukum Pajak, Hukum Hak Asasi Manusia, Kriminologi, dan Ilmu Perundang-undangan)
PHI	: Pengantar Hukum Indonesia
PIH	: Pengantar Ilmu Hukum
PLKH	: Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum

### **Daftar Singkatan Pengampu Mata Kuliah / Kegiatan Akademik**

FEK	: Fakultas Ekonomi
FH	: Fakultas Hukum
FIS	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
HAN	: [Bagian] Hukum Administrasi Negara
HIN	: [Bagian] Hukum Internasional
HTN	: [Bagian] Hukum Tata Negara
Lab	: Laboratorium Hukum

- LB : Lintas Bagian  
 LBhs : Lembaga Bahasa  
 LPPM : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
 MB : Multi Bagian  
 MPK : [Unit Pelaksana Teknis] Matakuliah Pengembangan Kepribadian  
 NB : Non Bagian  
 NFH : Non Fakultas Hukum  
 PDT : [Bagian] Hukum Perdata  
 PID : [Bagian] Hukum Pidana  
 PK : Program Kekhususan  
 UNI : Universitas

**H. Deskripsi Mata Kuliah Pendidikan Progam Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Peta Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

**[Deskripsi Mata Kuliah ini perlu disinkronisasikan dengan RPS (Rencana Pembelajaran Semester)]**

No	Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah	Kontribusi terhadap CPL
	Antropologi Budaya		
	Bahasa Indonesia		
	Bahasa Inggris		
	Diskresi Pemerintahan		
	Ekonomi Pembangunan		
	Etika dan Tanggung Jawab Profesi		
	Filsafat Hukum		
	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi		
	Hukum Acara Peradilan Agama		
	Hukum Acara Perdata		
	Hukum Acara Pidana		
	Hukum Acara Tata Usaha Negara		
	Hukum Adat		
	Hukum Administrasi Negara		
	Hukum Agraria		
	Hukum Asuransi		
	Hukum Bisnis Internasional		
	Hukum Dagang		
	Hukum Diplomatik dan Konsuler		
	Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional		
	Hukum Ekonomi Islam		
	Hukum Hak Asasi Manusia		
	Hukum Hak		

	Kekayaan Intelektual (HKI)		
	Hukum Humaniter		
	Hukum Internasional		
	Hukum Islam		
	Hukum Jaminan		
	Hukum Kehutanan		
	Hukum Keluarga dalam Islam		
	Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat		
	Hukum Kemaritiman		
	Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang		
	Hukum Kepegawaian		
	Hukum Kependudukan		
	Hukum Kesehatan		
	Hukum Ketenagakerjaan dan Perburuhan		
	Hukum Keterbukaan Informasi Publik		
	Hukum Ketetapan Administrasi Negara		
	Hukum Keuangan Negara		
	Hukum Kewarganegaraan		
	Hukum Kontrak Internasional		
	Hukum Koperasi		
	Hukum Laut Internasional		
	Hukum Lembaga Pembiayaan		
	Hukum Lingkungan		
	Hukum Organisasi Internasional		
	Hukum Pajak		
	Hukum Parlemen		
	Hukum Pasar Modal		
	Hukum Pelayanan Publik		
	Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa		
	Hukum Pemilihan Umum		



	Hukum Penanaman Modal		
	Hukum Pencemaran Lintas Batas		
	Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		
	Hukum Pengelolaan Aset Negara		
	Hukum Pengelolaan Sumberdaya Air		
	Hukum Pengungsi Internasional		
	Hukum Penintensier		
	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional		
	Hukum Peradilan		
	Hukum Perbankan		
	Hukum Perdata		
	Hukum Perdata Internasional		
	Hukum Perencanaan Anggaran Negara		
	Hukum Perikatan		
	Hukum Perizinan		
	Hukum Perjanjian Internasional		
	Hukum Perkawinan		
	Hukum Perkebunan		
	Hukum Perlindungan Konsumen		
	Hukum Persaingan Usaha		
	Hukum Persetujuan Khusus		
	Hukum Pertambangan		
	Hukum Perusahaan		
	Hukum Pidana		
	Hukum Pidana Administrasi		
	Hukum Pidana Anak		
	Hukum Pidana dalam Kodifikasi		
	Hukum Pidana di		

	Luar KUHP		
	Hukum Pidana Internasional		
	Hukum Pidana Islam		
	Hukum Presiden		
	Hukum Surat Berharga		
	Hukum Tanah		
	Hukum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
	Hukum Tata Negara		
	Hukum Tata Negara Indonesia		
	Hukum Tata Ruang		
	Hukum Transaksi Internasional		
	Hukum Transportasi		
	Hukum Udara dan Ruang Angkasa		
	Ilmu Negara		
	Ilmu Perundang-undangan		
	Kapita Selekta Hukum Perdata		
	Kapita Selekta Hukum Pidana		
	Kapita Selekta Kriminologi		
	Karya Tulis Ilmiah		
	Klinik Hukum		
	Kriminologi		
	Kuliah Kerja Lapangan (KKL)		
	Kuliah Kerja Nyata (KKN)		
	Metode Penelitian Hukum		
	Pendidikan Agama		
	Pendidikan Kewarganegaraan		
	Pendidikan Pancasila		
	Pengantar Hukum Indonesia		
	Pengantar Ilmu Ekonomi		
	Pengantar Ilmu Hukum		
	Pengantar Ilmu Politik		
	Pengantar Sosiologi		

	Perbandingan Hukum Pidana		
	Perbandingan Hukum Tata Negara		
	Perbuatan Melanggar Hukum		
	PLKH (Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum)		
	PLKH 1: Hukum Acara Pidana		
	PLKH 2: Praktik Peradilan Pidana		
	PLKH 3: Hukum Acara Perdata		
	PLKH 4: Praktik Peradilan Perdata		
	PLKH 5: Hukum Acara Tata Usaha Negara		
	PLKH 6: Praktik Peradilan Tata Usaha Negara		
	PLKH 7: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi		
	PLKH 8: Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi		
	PLKH 9: Perancangan Perundang-undangan		
	PLKH 10: Perancangan Kontrak dan Audit Hukum ( <i>Legal Audit</i> )		
	PLKH 11: <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR)		
	Sistem Hukum Nasional		
	Sistem Peradilan Pidana		
	Sistem Politik Indonesia		
	Sosiologi Hukum		
	Terminologi Hukum Asing ( <i>Foreign Legal Terms</i> )		
	Tindak Pidana di Bidang Perekonomian		
	Viktimologi		

